

BAB I PENDAHULUAN

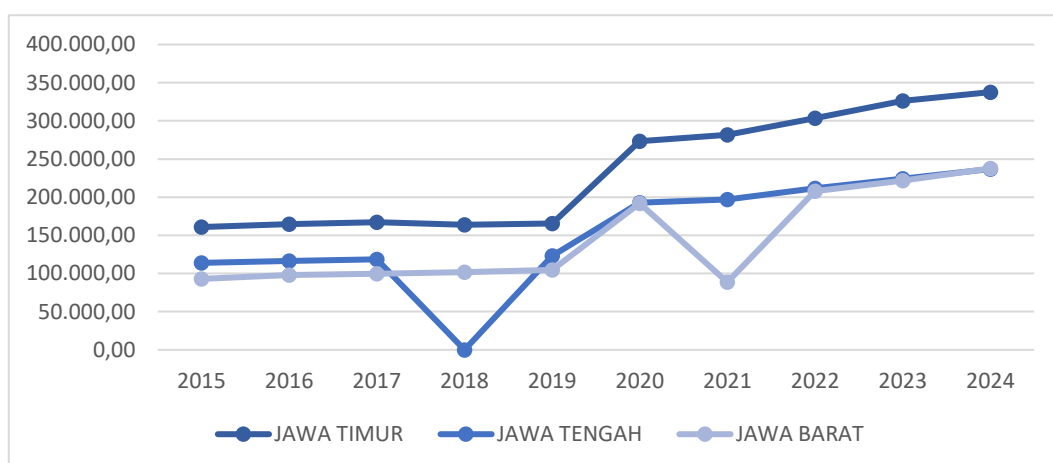
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan produksi barang dan jasa yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah merupakan indikator kunci keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyatnya (Susilowati & Adianita, 2023). Secara teori, peningkatan produksi dalam sektor perekonomian primer memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto melalui nilai tambah dari hasil pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia (Sampurnani et al., 2024)

Dalam perhitungan nasional sektor primer memiliki kontribusi yang relative lebih besar dalam menopang perekonomian suatu wilayah. Data menunjukkan kontribusi sektor primer terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dari tahun 2014-2023. Dimana sektor primer Pertanian, Kehutanan & Perikanan memberikan total kontribusi sebesar Rp 19.754,39 triliun dengan kontribusi tahunan rata-rata sebesar Rp 1.975,44 triliun. Dengan Nilai terendah Rp 1.409,66 triliun dan nilai tertinggi Rp 2.617,67 triliun (R et al., 2025). Sektor primer yang meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan berfungsi sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional apabila sektor lainnya seperti sektor Perindustrian dan Jasa mengalami penurunan. Sehingga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masuk kedalam kontribusi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut pengelompokan oleh badan pusat statistik sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan termasuk dalam PDRB kategori A dimana yang berperan dalam menciptakan nilai ekonomi bagi wilayah, sektor unggulan ekonomi yang meliputi hasil pertanian kehutanan perikanan berkontribusi secara konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi (Ilmi, 2021).

Gambar 1. 1 PDRB Kategori A Provinsi Jawa (Timur, Tengah, Barat)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 perkembangan PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat periode 2015–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun dengan pola yang berbeda di setiap wilayah. Provinsi Jawa Timur konsisten menjadi yang tertinggi sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2015–2019, nilai PDRB relatif stabil di kisaran Rp160–165 miliar. Kemudian terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp273,2 miliar atau meningkat sekitar 65% dibanding tahun sebelumnya, dan terus bertumbuh hingga mencapai Rp337,7 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan periode 2020–2024 sebesar 5,45% per tahun menunjukkan bahwa sektor primer di Jawa Timur memiliki kinerja yang stabil dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan tren pertumbuhan yang lebih bervariasi. Pada tahun 2015–2019, nilai PDRB meningkat perlahan dari

Rp113,8 miliar menjadi Rp123,2 miliar. Setelah terjadi kenaikan cukup tajam pada tahun 2020 sebesar 56% menjadi Rp192,6 miliar, kemudian terus meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp236,9 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan pada periode 2021–2024 berada pada 2–7% per tahun, yang menunjukkan kondisi relatif stabil. Provinsi Jawa Barat menunjukkan pola yang paling fluktuatif. Nilai PDRB meningkat perlahan dari Rp 92,8 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 104,6 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan hingga Rp 192,1 miliar, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan tajam menjadi Rp 88,6 miliar sebelum kembali meningkat hingga Rp 237,6 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya perubahan kondisi ekonomi atau penyesuaian data pada periode tertentu. Secara keseluruhan di ketiga provinsi ini menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam mendukung perekonomian lokal dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah regional (Naufal et al., 2023).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa luas lahan pertanian, jumlah produk hutan, dan adanya potensi perikanan yang kuat di suatu daerah dapat menjadikan sektor primer sebagai salah satu kontributor utama perekonomian lokal. Kontribusi sektor primer dapat dilihat melalui perannya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto Regional di suatu daerah atau wilayah tertentu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membantu membentuk produk domestik bruto regional dan menunjukkan bahwa industri utama di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal (Syaputra et al., 2025)

Pada sektor primer yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, subsektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan. Potensi tersebut diperoleh dari sumber daya produksi

hutan yang dapat dimanfaatkan baik produksi hutan berupa kayu maupun non-kayu. Masih Banyak produksi hasil hutan yang berperan sebagai komoditas ekonomi bernilai tinggi dengan permintaan relatif tinggi dalam kegiatan kehutanan (Kurnia et al., 2019).

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024, produksi kayu bulat mencapai 64,84 juta meter kubik (Statistik, 2024). Meskipun demikian kontribusi subsektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi sumber daya hutan yang dimilikinya. Padahal subsektor kehutanan merupakan bagian dari sektor primer yang berperan dalam menciptakan output ekonomi yang menambah nilai bagi perekonomian daerah (Dwi & Budi, 2017). Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara sumber daya hutan yang tersedia dan nilai ekonomi yang dihasilkan dalam perekonomian daerah. Dengan kata lain, potensi produksi kayu yang tinggi dari kawasan hutan produktif belum sepenuhnya terlihat dalam pertumbuhan output industri kayu atau dalam perhitungan PDRB (Dwi et al., 2017). Fenomena ini dapat dijelaskan oleh hubungan antara jumlah kayu yang diproduksi dan luas lahan hutan produktif yang dikelola. Secara umum pengelolaan hutan di Jawa Timur berada dalam kondisi yang relatif baik dari segi luas maupun potensi sumber dayanya (Dwi & Budi, 2017).

Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah merupakan salah satu peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor kehutanan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan baik dari sisi luas kawasan hutan maupun potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini dikarenakan adanya hubungan langsung antara kapasitas sumber daya hutan dengan potensi peningkatan produksi hasil hutan, khususnya komoditas kayu. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari subsektor kehutanan, yang sekaligus menjadi indikator utama dari output kegiatan pengelolaan hutan. Dengan demikian, output yang dihasilkan dari subsektor kehutanan tidak hanya memberikan kontribusi secara langsung terhadap perekonomian daerah, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku dalam kegiatan industri pengolahan (Sahara et al., 2022). Oleh Karena itu kinerja subsektor kehutanan merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah khususnya di daerah dengan tingkat produksi kehutanan yang tinggi.

Sebagai salah satu komoditas unggulan dalam sektor kehutanan, kayu jati atau yang memiliki nama latin (*Tectona Grandis*) menjadikan tanaman hutan yang memiliki nilai jual dan juga banyak peminat karena struktur kayunya yang kuat terutama di wilayah wilayah jawa termasuk juga wilayah di jawa timur (Salsabila et al., 2024). Dalam kegiatan kehutanan, luas kawasan hutan produksi merupakan faktor utama yang menentukan potensi produksi kayu jati. Semakin luas kawasan hutan yang dikelola, maka semakin besar pula potensi produksi yang dapat dihasilkan. Dimana produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun karena pengolahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya pengelolaan hutan dan industry pengolahan kayu. (Sukamto et al., 2021). Meskipun demikian, peningkatan produksi kayu jati tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kontribusi yang optimal terhadap perekonomian daerah, terutama di beberapa wilayah di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih relatif terbatas. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan sumber daya kayu yang belum merata,

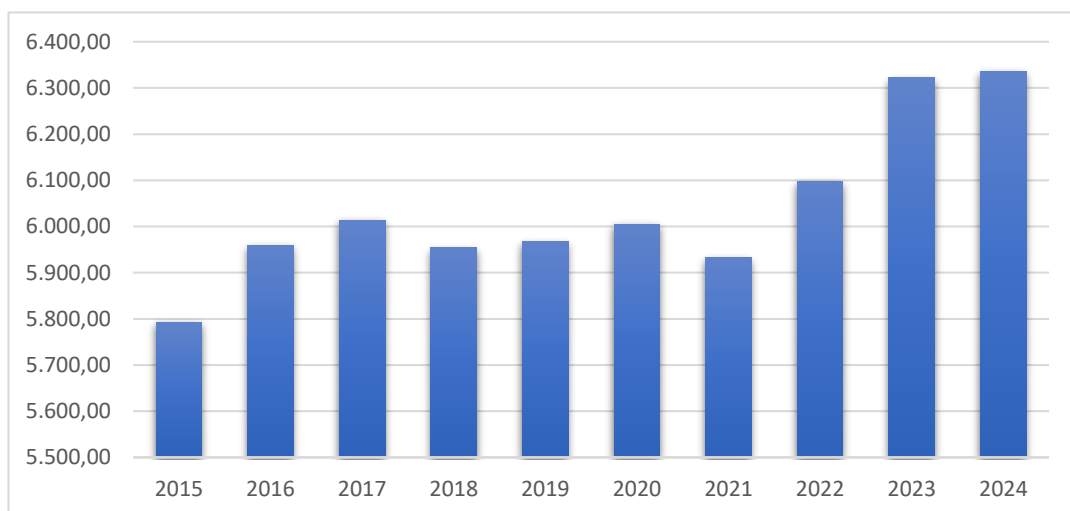
fluktuasi harga kayu di pasar, serta sistem distribusi yang belum berjalan secara efisien. Lebih lanjut, produksi kayu secara umum cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terdapat perbedaan yang mencolok antara peningkatan produksi dan kontribusi subsektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (Mutaqin et al., 2022). Seringkali tingkat produksi yang lebih tinggi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Di karenakan pengelolaan harga barang-barang hutan seperti kayu olahan dan sistemnya yang kurang memadai juga merupakan salah satu penyebabnya.

Dari perspektif produksi ekonomi, peningkatan jumlah output yang dihasilkan oleh sektor kehutanan akan meningkatkan nilai tambah yang kemudian tercermin dalam pertumbuhan PDRB (Mwitwa et al., 2015). kontribusi subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian regional mengungkapkan bahwa, meskipun merupakan komponen penting dari struktur ekonomi regional, kinerjanya berbeda menurut wilayah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal. (Yadeta, 2017).

Jawa Timur, memiliki daerah-daerah pasokan kayu terbesar, yaitu meliputi Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan Madiun (Perhutani, 2024). Kabupaten Bojonegoro juga merupakan salah satu lokasi penghasil jati yang besar. Perhutani bertanggung jawab mengelola sebagian besar pohon jati di daerah bojonegoro yang secara historis telah menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk setempat. Hutan jati yang luas di Bojonegoro berasal dari masa penjajahan Belanda. Bahkan iklim Bojonegoro yang kering dan tandus memberikan keuntungan khusus untuk pengembangan jati. Kayunya yang kuat, tahan lama, dan tahan terhadap kerusakan (Pradita & Mustafa, 2024).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah penyangga produksi kayu di Provinsi Jawa Timur dengan potensi sumber daya hutan yang signifikan (Laurinda et al., 2018). Pasokan bahan baku untuk industri kehutanan daerah sebagian besar didukung oleh kabupaten ini, yang terkenal sebagai salah satu pusat produksi jati (Laurinda et al., 2018). Yang dikelola oleh Pengelolaan Hutan yakni Perum Perhutani, yang bertugas mengelola lahan hutan produktif di wilayah ini. Kesatuan Pemangku Hutan Perum Perhutani juga merupakan faktor kunci dalam menentukan nilai ekonomi sektor kehutanan. Oleh karena itu memfokuskan penelitian pada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Padangan sangat penting untuk melihat apakah pengelolaan produksi sumber daya alam di tingkat KPH berkontribusi terhadap PDRB.

Gambar 1. 2 PDRB Kategori A Kab.Bojonegoro 2015-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.2 data PDRB ADHK Kategori A Kabupaten Bojonegoro tahun 2015-2024, terlihat bahwa perkembangan nilai PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai PDRB tercatat sebesar 5.792,61, kemudian meningkat menjadi 5.959,90 pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebesar sekitar 2,89%. Pada tahun 2017 kembali meningkat

menjadi 6.013,81 atau naik sebesar 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 5.953,73 atau turun sebesar 1,00%. Pada tahun 2019 nilai PDRB kembali meningkat menjadi 5.966,56 atau naik sebesar 0,22%. Peningkatan berlanjut pada tahun 2020 menjadi 6.005,31 atau naik sebesar 0,65%. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 5.932,64 atau turun sebesar 1,21% yang merupakan penurunan terdalam selama periode pengamatan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 6.097,92 atau naik sebesar 2,79%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 menjadi 6.321,94 atau meningkat sebesar 3,67%, dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 6.335,68 atau naik sebesar 0,22%. Grafik tersebut dengan nyata menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHK Kategori A mengalami fluktuasi antara tahun 2016-2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume produksi belum berbanding lurus dengan nilai tambah ekonomi, kemungkinan disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas atau belum optimalnya pengolahan hasil hutan menjadi produk bernilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan sektor basis yang cukup penting dalam perekonomian regional. Dimana perubahan bisa disebabkan oleh factor-faktor yang berkaitan dengan aktivitas di sektor kehutanan, seperti banyaknya produk yang dihasilkan dan luas lahan yang digunakan untuk produksi (Zamrodah & Prayudhi, 2024).

Pemilihan lokasi penelitian pada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) tidak dapat dilakukan secara acak, mengingat setiap KPH memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi potensi sumber daya, kapasitas kelembagaan, maupun kontribusi ekonominya. Penelitian mengenai tipologi KPH di Indonesia menunjukkan bahwa KPH diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan

tingkat potensi usaha, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan sehingga setiap KPH memiliki tingkat produktivitas dan kinerja yang berbeda-beda (Budiningsih & Ekawati, 2015).

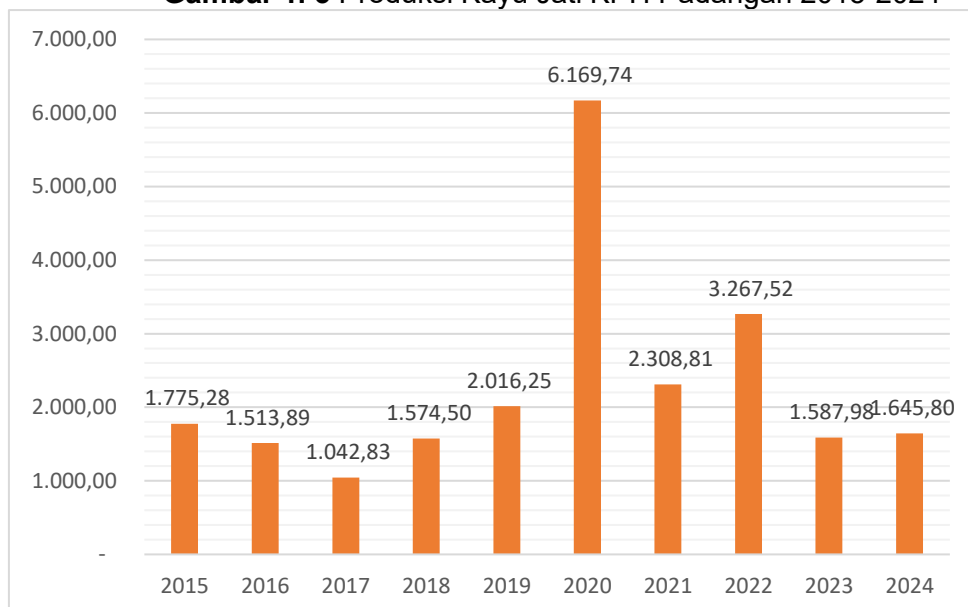
Berdasarkan publikasi Perum Perhutani, kayu jati yang berasal dari wilayah Bojonegoro termasuk KPH Padangan, dikenal memiliki kualitas yang baik dan diminati oleh pasar khususnya industri pengolahan kayu di daerah seperti Jepara dan Solo. Secara teoritis kualitas kayu jati dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kesesuaian lahan, serta sistem pengelolaan hutan yang diterapkan. Hal ini menjelaskan bahwa perbedaan kualitas antar wilayah KPH merupakan hal yang wajar, sehingga tidak semua kawasan hutan yang luas memiliki tingkat produktivitas atau kualitas yang sama, bahkan pada kondisi tertentu dapat ditemukan area hutan yang belum optimal atau mengalami degradasi akibat siklus tebang dan reboisasi.

Hutan produksi di tingkat KPH Padangan tidak hanya sebagai pemasok bahan baku untuk industri kehutanan. Hutan produksi juga membantu meningkatkan ekonomi di daerah dengan menghasilkan pendapatan melalui kegiatan produksi kayu tahunan. Hutan produksi merupakan area hutan milik negara yang digunakan untuk menghasilkan kayu dan produk hutan lainnya secara berkelanjutan. Hutan-hutan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menciptakan nilai ekonomi dan memberikan pendapatan bagi daerah (Zamrodah & Prayudhi, 2024). Dalam kegiatan ini produksi kayu jati yang dilakukan oleh unit pengelolaan hutan seperti KPH Padangan dapat memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto khususnya sub sektor kehutanan yang juga termasuk pada kategori A, yang meliputi

pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini menunjukkan seberapa baik kinerja sektor primer ekonomi regional.

Pada konteks teori produksi lahan atau kawasan produksi hutan merupakan salah satu faktor input utama yang mempengaruhi tingkat output di sektor kehutanan. Sejalan dengan ini Luas kawasan hutan produksi adalah ketersediaan modal alam (*natural capital*) sebagai input primer dan menunjukkan seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia dan menghasilkan produksi hutan. Sumber daya hutan ini merupakan jenis input produksi yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan membantu mendukung perekonomian lokal. Semakin besar luas hutan produksi, semakin banyak hasil yang dapat dihasilkan oleh sektor kehutanan (Sahara et al., 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, produksi kayu jati sebagai output dari pemanfaatan luas kawasan hutan produksi menunjukkan dinamika yang berbeda setiap tahunnya.

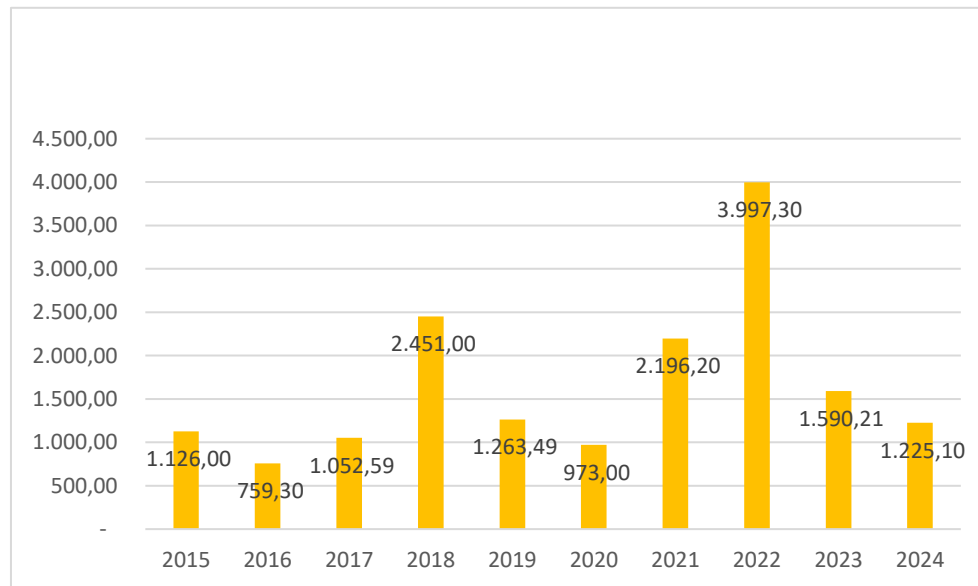
Gambar 1. 3 Produksi Kayu Jati KPH Padangan 2015-2024



Sumber: Perum Perhutani KPH Padangan (2026)

Berdasarkan data produksi kayu jati KPH Padangan tahun 2015–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 produksi tercatat sebesar 1.775,28 m³, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.513,89 m³ pada tahun 2016 atau turun sebesar sekitar 14,73%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2017 menjadi 1.042,83 m³ atau turun sebesar 31,11%. Pada tahun 2018 produksi meningkat menjadi 1.574,50 m³ atau naik sebesar 50,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan berlanjut pada tahun 2019 menjadi 2.016,25 m³ atau naik sebesar 28,06%. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan produksi mencapai 6.169,63 m³ atau meningkat drastis sebesar 206,00%. Namun pada tahun 2021 produksi kembali mengalami penurunan menjadi 2.308,81 m³ atau turun sebesar 62,58%. Pada tahun 2022 produksi meningkat menjadi 3.267,52 m³ atau naik sebesar 41,52%. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 1.587,98 m³ atau turun sebesar 51,40%, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.645,80 m³ atau naik sebesar 3,64%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa produksi kayu jati sebagai komoditas hutan tidak konstan tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan terkait rencana penebangan, umur tegakan pohon dan sistem pengelolaan yang digunakan oleh Perum Perhutani sebagai pengelola hutan negara (Bahtiar et al., 2023). Peningkatan produksi yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa banyaknya aktivitas penebangan atau implementasi rencana penebangan skala besar sedangkan penurunan pada tahun-tahun berikutnya mungkin menunjukkan proses penyesuaian terhadap prinsip hasil berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi regional, jumlah produksi kayu jati berfungsi sebagai indikator output riil di sektor kehutanan, yang berpotensi menciptakan nilai tambah (Umami et al., 2017).

Parahita (2018) Pada konteks penelitian ini nilai tambah yang dihasilkan akan berpengaruh PDRB khususnya kategori A yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagaimana diklasifikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu perubahan volume produksi jati di KPH Padangan secara teoritis berhubungan dengan dinamika PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Bojonegoro. Karena luas kawasan hutan produksi merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan produksi kayu kedua hal tersebut memiliki hubungan yang dapat memengaruhi nilai output sektor kehutanan dalam perekonomian. Namun tingginya hasil produksi kayu yang dihasilkan termasuk oleh Perum Perhutani melalui unit pengelolaan seperti KPH Padangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kategori A. Hal ini disebabkan karena PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan disajikan secara agregat, sehingga pengaruh spesifik dari aktivitas produksi kayu tidak dapat terlihat secara langsung dalam pembentukan nilai tambah sektor tersebut di tingkat daerah. Selain produksi sebagai output, luas kawasan hutan produksi sebagai faktor input juga menunjukkan dinamika yang signifikan.

Gambar 1. 4 Luas Kawasan Produksi Kayu Jati KPH Padangan

Sumber: Perum Perhutani KPH Padangan (2026)

Berdasarkan data luas kawasan hutan produksi kayu jati KPH Padangan tahun 2015–2024, terlihat adanya perubahan yang cukup dinamis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 luas kawasan tercatat sebesar 1.126,00 hektar, kemudian mengalami penurunan menjadi 759,30 hektar pada tahun 2016 atau turun sebesar 32,57%. Pada tahun 2017 luas kawasan kembali meningkat menjadi 1.052,59 hektar atau naik sebesar 38,62%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 menjadi 2.451,00 hektar atau naik sebesar 132,80%. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 1.263,49 hektar atau turun sebesar 48,45%, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 973,00 hektar atau turun sebesar 22,99%. Pada tahun 2021 luas kawasan meningkat menjadi 2.196,20 hektar atau naik sebesar 125,60%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 3.997,39 hektar atau meningkat sebesar 81,99%. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 1.590,21 hektar atau turun sebesar 60,22%, dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 1.225,10 hektar atau turun sebesar 22,96%. Fluktuasi ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh

perencanaan produksi, siklus panen tanaman jati, dan prinsip keberlanjutan yang diterapkan oleh Perum Perhutani sebagai pengelola hutan nasional.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan produksi bukan hanya tentang aspek ekologi dan keberlanjutan tetapi juga terkait dengan aktivitas ekonomi yang berasal dari penggunaan sumber daya hutan. Dari perspektif pertumbuhan ekonomi hubungan antara luas hutan produksi sebagai sumber daya alam, produksi kayu sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai ekonomi dari output tersebut dan hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Melalui penerapan fungsi produksi, teori ini menjelaskan bahwa output suatu wilayah ekonomi muncul dari kombinasi berbagai faktor produksi, termasuk sumber daya alam, yang bertindak sebagai aset modal fisik yang menentukan kapasitas produksi suatu wilayah (Soukhovolsky & Ivanova, 2018). Namun penelitian yang membahas kontribusi sektor primer terhadap ekonomi lokal cenderung lebih fokus pada subsektor pertanian dan perkebunan. Penelitian yang secara khusus meneliti subsektor kehutanan, terutama hubungan antara luas hutan produksi dan produksi kayu dalam kaitannya dengan ekonomi lokal dianggap terbatas. Dalam implementasi yang diamati pada penelitian di Kabupaten Bojonegoro, kajian mengenai hubungan antara produksi kayu, luas hutan produksi, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembahasan yang secara spesifik mengaitkan ketiga aspek tersebut belum banyak dilakukan, terutama pada lingkup pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan. Faktanya KPH sebagai unit pengelola memiliki peran penting dalam menentukan dinamika produksi kayu dan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang pada

akhirnya dapat berpengaruh terhadap pembentukan nilai ekonomi sektor kehutanan di daerah (Lingkungan Hidup, 2018)

Penelitian ini memiliki aspek keterbaruan pada beberapa hal yaitu penggunaan data time series dengan rentang waktu 2011-2025, penerapan metode analisis regresi linier berganda serta pemanfaatan perangkat lunak Eviews 12 untuk pengolahan data dan interpretasi hasil dan terdapat keterbaruan pada objek lokal yaitu produksi kayu jati dan luas Kawasan hutan produksi kayu jati. Data time series digunakan untuk mengamati variabel yaitu selama 11 tahun, sehingga dapat menangkap kontribusi dan peran pohon jati yang dikelola oleh KPH Padangan terhadap PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Metode regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh apakah sektor kehutanan khususnya KPH Padangan terhadap PDRB. Teknik ini memungkinkan peneliti mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara lebih akurat dibandingkan pendekatan deskriptif semata. Selain itu, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews 12 dalam pengolahan data serta pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih valid dan reliabel. Penggunaan Eviews 12 juga memungkinkan penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel yang lebih sistematis dan informatif untuk mendukung interpretasi hasil penelitian.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak produksi kayu dan luas hutan produksi milik KPH Padangan serta untuk menguji hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Bojonegoro menggunakan data time series dari tahun 2011-2025. Penelitian sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menguji

hubungan antara kedua variabel tersebut di Bojonegoro dalam sektor primer kehutanan khususnya hutan jati yang merupakan ikonik kota Bojonegoro sehingga menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang topik ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk membentuk kebijakan pengelolaan hutan daerah dan menjadi referensi untuk penelitian masa depan pada topik serupa.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian berjudul **"PENGARUH LUAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN PRODUKSI KAYU JATI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KATEGORI A (STUDI PADA KPH PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO)"**

1.2 Perumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Luas Kawasan Hutan Produksi Kayu Jati KPH Padangan secara parsial berpengaruh terhadap PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah Produksi Kayu Jati KPH Padangan secara parsial berpengaruh terhadap PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah Luas Kawasan Hutan Produksi Kayu Jati dan Produksi Kayu Jati KPH Padangan secara Simultan berpengaruh terhadap PDRB Kategori (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, muncul tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara kuantitatif apakah Luas Kawasan Hutan Produksi Kayu Jati KPH Padangan berpengaruh terhadap PDRB Kategori (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis secara kuantitatif apakah Produksi Kayu Jati KPH Padangan berpengaruh terhadap PDRB Kategori (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk menganalisis secara kuantitatif apakah Luas Kawasan Hutan Produksi Kayu Jati dan Produksi Kayu Jati KPH Padangan secara bersamaan berpengaruh terhadap PDRB Kategori (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian ekonomi regional, khususnya mengenai peran sektor kehutanan dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi empiris untuk menjelaskan hubungan antara ketersediaan sumber daya alam, aktivitas produksi, dan nilai ekonomi komoditas yang terdapat kaitannya dengan hasil ekonomi regional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak pengelola sumber daya alam hutan, seperti Perum Perhutani dan dinas kehutanan, dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk

mengelola hutan produksi. Dengan bagaimana produksi kayu dan luas lahan hutan mempengaruhi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

3. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian yang akan datang terkait kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam lingkup unit pengelolaan hutan seperti KPH. Karena penelitian tentang sektor kehutanan di tingkat daerah, terutama mengenai hubungan antara produksi kayu dan luas kawasan hutan terhadap produk domestik regional bruto, masih terbatas. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di daerah-daerah lain dengan karakteristik sumber daya alam yang serupa.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memastikan fokus penelitian tetap pada tujuan utamanya, studi ini hanya meneliti sektor kehutanan yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangku Hutan (KPH Padangan) di Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan KPH Padangan bukan untuk menunjukkan bahwa unit ini merupakan kekuatan utama di balik perekonomian sub sektor kehutanan lokal, tetapi untuk menunjukkan bahwasanya unit pengelolaan hutan produksi yang memiliki catatan administrasi yang jelas tentang produksi jati. Penelitian ini meneliti tiga faktor utama, yaitu; berapa banyak jati yang diproduksi dan luas area jati ditanam.

Penelitian ini focus pada sektor yang memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Kategori A di Kabupaten Bojonegoro, Dimana yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan diukur menggunakan harga konstan (ADHK). Dalam penelitian ini, PDRB kategori A digunakan karena tidak tersedia subsektor kehutanan, dan tidak dipublikasikan secara terpisah dalam laporan

resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak nilai tambah di sektor primer. Data yang digunakan adalah data sekunder time series yang dikumpulkan antara tahun 2011-2025 bersumber dari Perum Perhutani KPH Padagan dan Baan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Batasan penelitian dilakukan untuk melakukan analisis hubungan-hubungan aktivitas produksi pada tingkat unit pengelolaan hutan dengan pembentukan nilai tambah sektor kehutanan.